



# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2023**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI JAMBI**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jambi, Januari 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Jambi

  
**ASRAF, S.Pt, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661120 199403 1 006



## Ikhtisar Eksekutif

Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2023 adalah sebagai pertanggung-jawaban kinerja Dinas selama tahun 2023, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Perda No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang dihasilkan Tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut : Dari indikator kinerja utama SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023, menunjukkan bahwa capaian pada IKU telah mendekati target yang ditetapkan. Capaian kinerja IKU sebagai berikut :

- a. Untuk sasaran Meningkatnya produksi perikanan, terdapat 2 (dua) indikator sasaran yaitu: 1) Jumlah produksi perikanan tangkap (ton), dan; 2) Jumlah produksi perikanan budidaya (ton). Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk indikator 1) Jumlah produksi perikanan tangkap pada Tahun 2023 adalah sebesar 100,0% dan untuk indikator 2) Jumlah produksi perikanan budidaya pada Tahun 2023 adalah sebesar 86,12%
- b. Sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, terdapat 4 indikator sasaran yaitu: 1) Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 0,00%; 2) Kawasan konservasi yang

dikelola secara berkelanjutan (ha) capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2023 adalah sebesar 0,00%; 3) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2023 adalah sebesar 95,38%, dan; 4) Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2023 adalah sebesar 100,0%.

- c. Sasaran meningkatnya Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan, dengan indikatornya Jumlah rumah tangga perikanan (RTP), capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebesar 109,7%.
- d. Sasaran meningkatnya angka konsumsi ikan, dengan indikatornya Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun), capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebesar 99,51%.
- e. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikatornya Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebesar 96,5%

Selanjutnya untuk mencapai sasaran strategik tersebut diimplementasikan melalui 6 (enam) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan termasuk rutin. Pada awal penyusunan Anggaran biaya untuk mengimplementasikan 6 program tersebut sebesar Rp 29.032.514.688,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp 35.170.106.660,- atau naik sebesar 21,1% yang terdiri dari dana APBD Murni baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi selama tahun 2023 telah memenuhi seluruh sasaran strategik dari 5 sasaran strategik yang ditargetkan. Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu: 1) Meningkatkan produksi perikanan; 2) Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan; 3) Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan; 4) Meningkatkan angka konsumsi ikan, dan; 5) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik.

Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil



analisis atas capaian kinerja tahun 2023 dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

1. Selalu konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terutama dengan dinas yang membidangi perikanan ditingkat Kabupaten/Kota dalam upaya penyelarasan program kegiatan guna tercapainya sasaran kelautan dan perikanan yang sudah ditetapkan .
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan program dan kegiatan dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategik yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
3. Menciptakan inovasi di bidang kelautan dan perikanan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi terutama permasalahan pakan ikan serta dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3 Isu-isu Strategis	4
1.4 Keadaan Pegawai	5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	8
1.6 Keuangan	9
1.7 Sistematika Laporan	10
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Perencanaan Strategis	12
2.2 Perjanjian Kinerja	15
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023	16
III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	18
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	20
3.3 Realisasi Anggaran	36
IV. PENUTUP	39
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Perencanaan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022-2026	12
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi serta Program yang mendukung	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 2.4	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	17
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kerja	18
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023	19
Tabel 3.3	Capaian realisasi kinerja meningkatnya produksi perikanan	20
Tabel 3.4.	Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tahun 2023 serta Tahun 2021 dan Tahun 2022	21
Tabel 3.5	Capaian Kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan s.d Jangka Menengah Daerah	22
Tabel 3.6	Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Tahun 2023	25
Tabel 3.7	Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan s.d Jangka Menengah Daerah	27
Tabel 3.8	Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2023	30
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Meningkatnya Pelaku Usaha s.d Jangka Menengah Daerah	30
Tabel 3.10	Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya angka konsumsi ikan Tahun 2023	31
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Angka konsumsi ikan Tahun 2023 serta Tahun 2021 dan Tahun 2022	32
Tabel 3.12	Capaian Kinerja sasaran meningkatnya angka konsumsi ikan s.d Jangka Menengah Daerah	33
Tabel 3.13	Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023	34
Tabel 3.14	Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023 serta Tahun 2021 dan Tahun 2022	34
Tabel 3.15	Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik s.d Jangka	35

Tabel 3.16	Menengah Daerah Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023	37
Tabel 3.17	Analisis efisiensi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023	38

## DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	2
Gambar 1.2	Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023	7
Gambar 1.3	Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	7
Gambar 1.4	Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023	7
Gambar 1.5	Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	8
Gambar 3.1	Perbandingan realisasi produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya	21
Gambar 3.2	Perbandingan realisasi persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	26
Gambar 3.3	Perbandingan realisasi angka konsumsi ikan	32
Gambar 3.5	Perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2021-2022	35



## I PENDAHULUAN

### 1.1. Struktur Organisasi

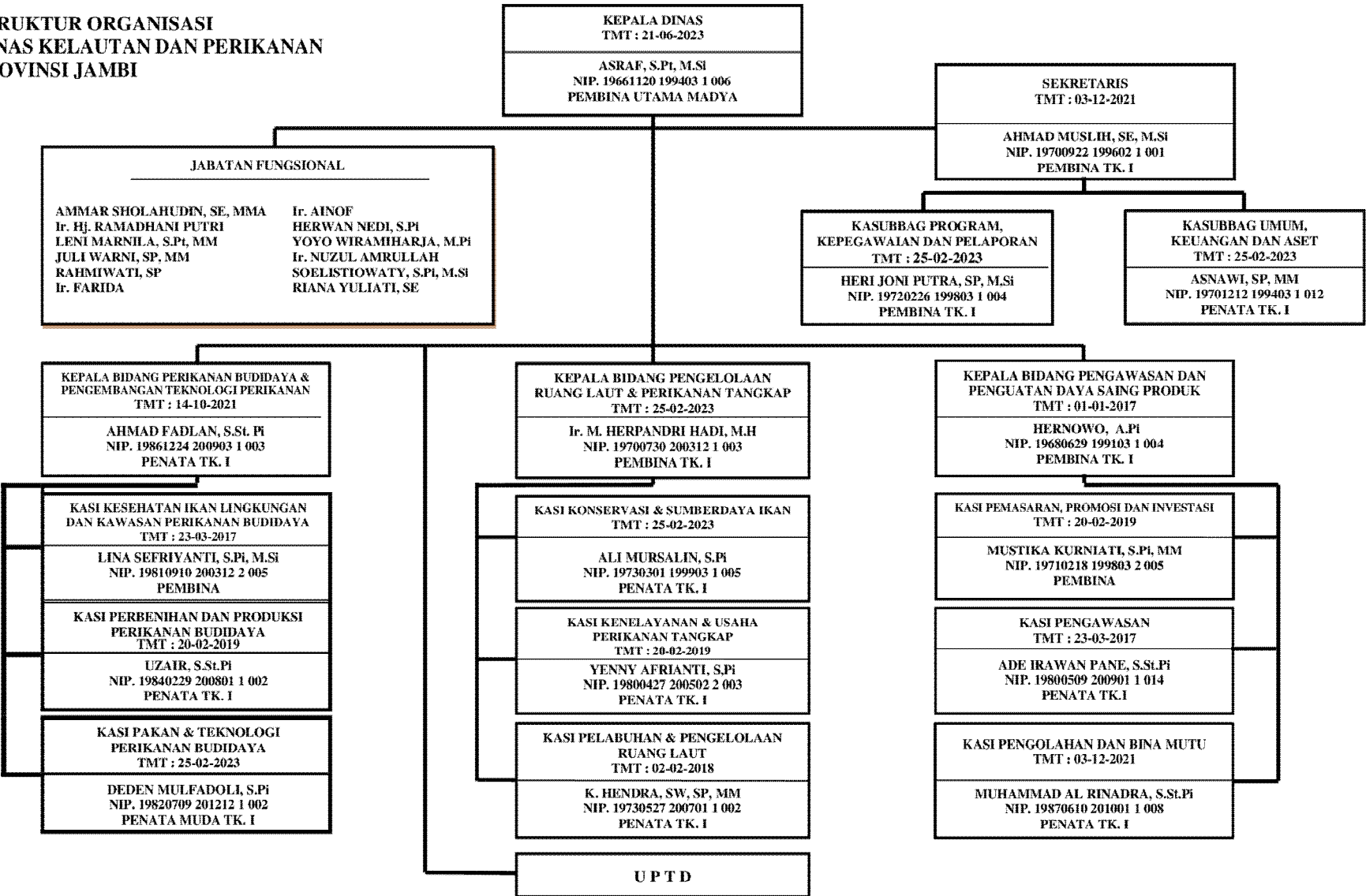
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 14 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Jambi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sebelumnya bernama Dinas Perikanan Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 1996 tanggal 18 November 1996 tentang Struktur Organisasi Dinas Perikanan Provinsi Jambi.

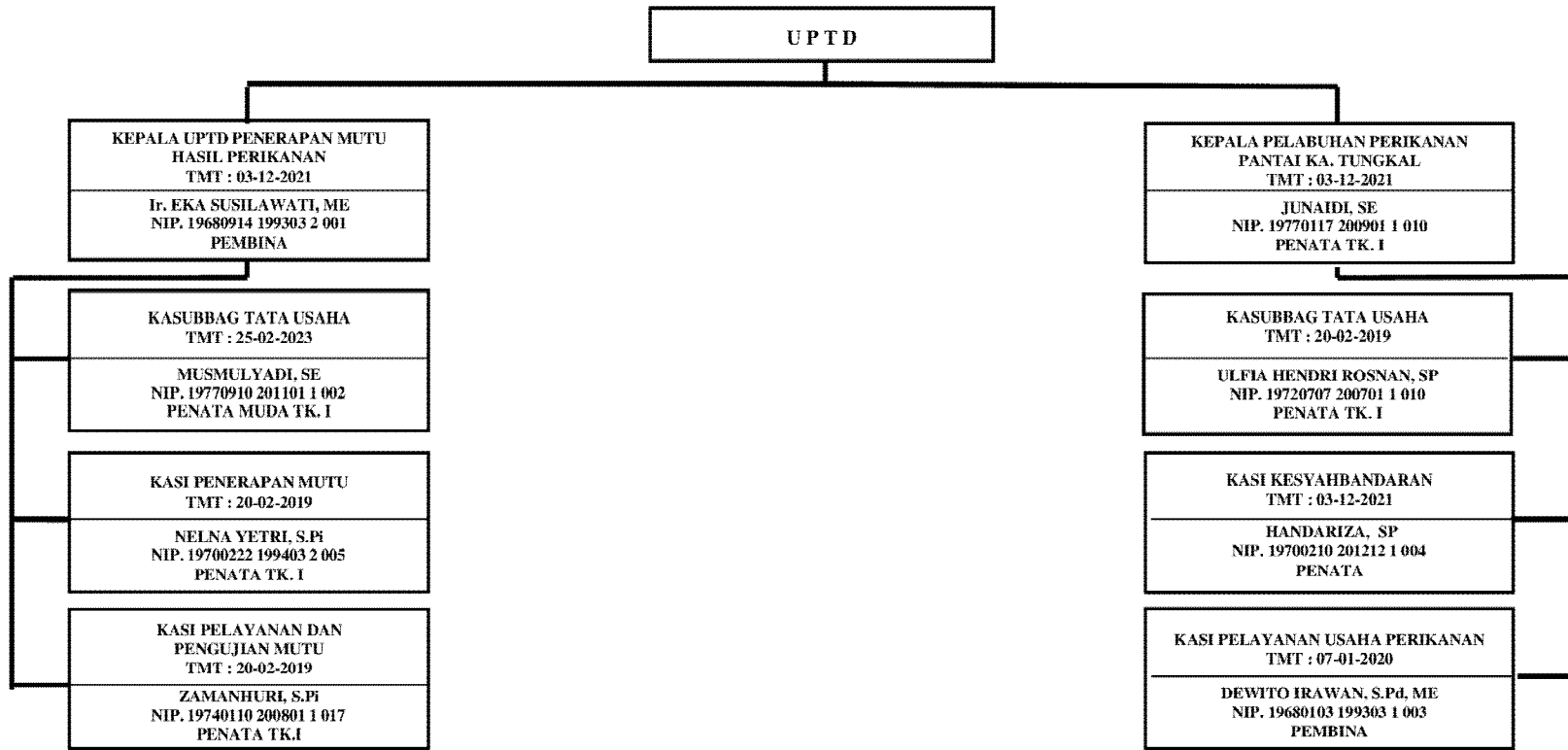
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 menggunakan struktur Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023.

#### **Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI JAMBI**





## **1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 51 Tahun 2016 adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup Provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan, pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan teknologi perikanan, pengawasan dan penguatan daya saing produk;
- e. Perumusan Kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **1.3. Isu-isu Strategis**

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan terdapat hambatan dan permasalahan serta isu strategis yang secara langsung dan tidak

langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan pencapaian kinerja.

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun internal. Isu strategis yang berkembang pada pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap, budidaya serta pengolahan hasil kelautan dan perikanan,
2. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang belum ramah lingkungan,
3. Biaya produksi nelayan, pembudidaya dan unit pengolahan ikan relatif masih tinggi,
4. Masih rendahnya sumberdaya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan,
5. Masih rendahnya produksi dan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.

#### **1.4. Keadaan Pegawai**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, serta, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerapan Mutu Hasil Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang dan 2 Orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sekretaris, membawahi :
  - Sub Bagian Program,Kepegawaian dan pelaporan
  - Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset

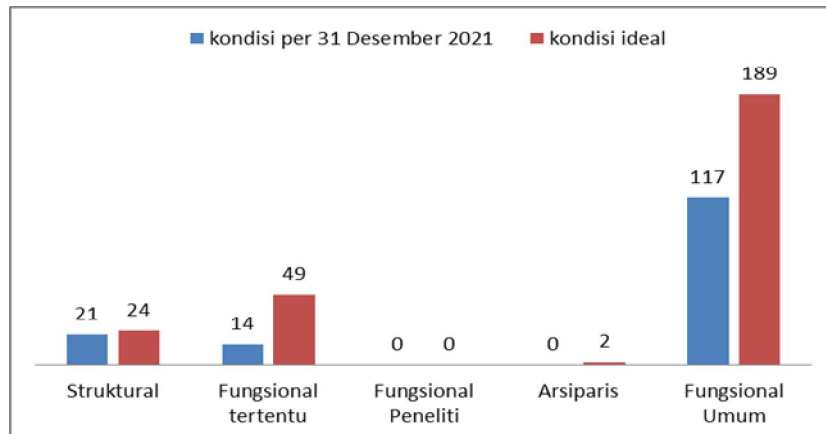


- b. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
  - Seksi Perbenihan dan produksi
  - Seksi Kesehatan ikan, lingkungan dan kawasan perikanan budidaya
  - Seksi Pakan dan teknologi perikanan budidaya
- c. Bidang Pengelolaan ruang laut dan Perikanan Tangkap, membawahi :
  - Seksi Kenelayanan dan usaha perikanan tangkap
  - Seksi Konservasi dan sumberdaya ikan
  - Seksi Kepelabuhan dan pengelolaan ruang laut
- d. Bidang pengawasan dan penguatan daya saing produk, membawahi:
  - Seksi Pengawasan
  - Seksi Pengolahan dan bina mutu
  - Seksi pemasaran, promosi dan investasi
- e. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal, membawahi :
  - Subbag Tata usaha
  - Seksi Kesyahbandaran
  - Seksi Pelayanan Usaha Perikanan
- f. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
  - Subbag TU
  - Seksi Penerapan Mutu
  - Seksi Pelayanan dan Pengujian Mutu

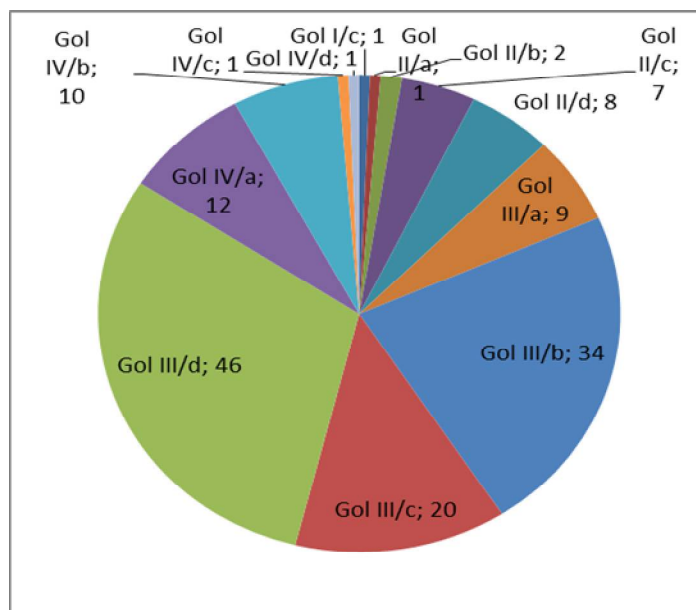
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi sumberdaya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 152 pegawai yang terdiri dari 21 pejabat struktural, 14 pejabat fungsional tertentu, dan 117 fungsional umum.

Profil Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi disajikan dalam gambar berikut :

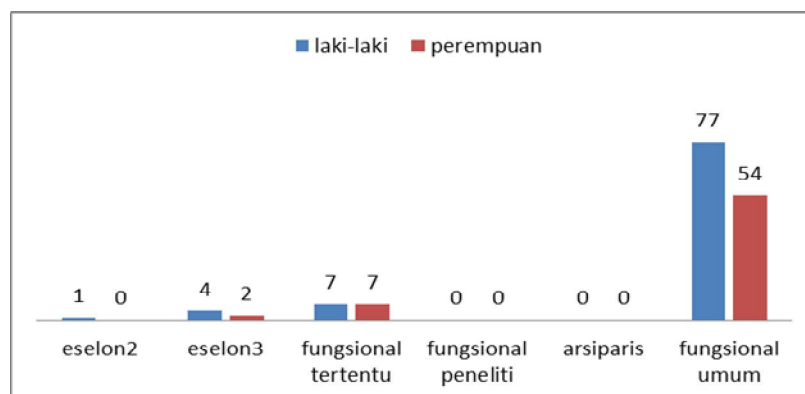
**Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023**



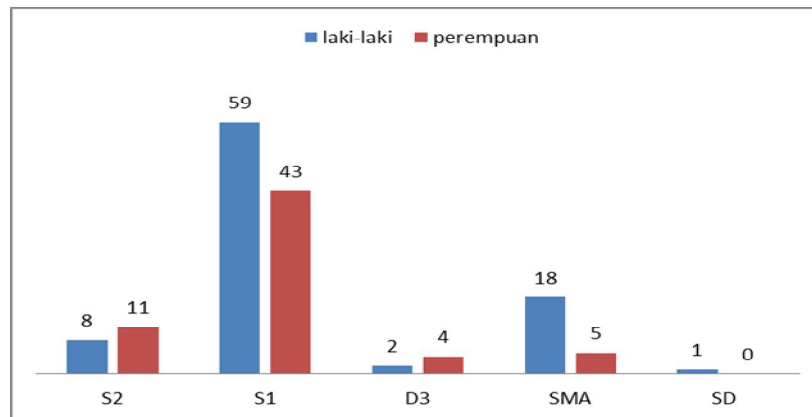
**Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi**



**Gambar 1.4 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023**



**Gambar 1.5** Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi



### 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini asset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023**

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1	Alat-alat besar	1	Baik
2	Alat-alat angkutan	67	Baik
3	Alat bengkel dan alat ukur	55	Baik
4	Alat pertanian	221	Baik
5	Alat kantor dan rumah tangga	1.075	Baik
6	Alat Studio dan alat komunikasi	92	Baik
7	Alat kedokteran dan kesehatan	16	Baik
8	Alat Laboratorium	34	Baik
9	Alat Persenjataan	10	Baik
10	Komputer	208	Baik
11	Bangunan gedung	206	Baik
12	Jaringan	161	Baik
13	Aset lainnya	67	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

## 1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2023 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada tahun 2023 anggaran Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 29.032.514.688,- (dua puluh sembilan milyar tiga puluh dua juta lima ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dan pada APBD perubahan menjadi Rp 35.170.106.660,- (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) atau naik sebesar 21,1% dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 24.633.888.907 (dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan belanja langsung sebesar

Rp. 10.536.217.753,- (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung dan tidak langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 35.170.106.660,- (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) untuk mendanai 6 (enam) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan termasuk rutin.

### **1.7 Sistematika Laporan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi serta potensi yang menjadi ruang lingkup perangkat daerah dan sistematika penulisan LKjIP.

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis



pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### **LAMPIRAN**

## II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menyusun Perencanaan stratejik yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dengan mempertimbangkan potensi lahan dan kondisi yang dimiliki saat ini dan harapan yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang maka rumusan tujuan, sasaran dan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Perencanaan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	54.480,9	54.807,8	55.136,7	55.467,5	55.800,3
			Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	57.168,0	58.997,0	60.885,0	62.833,0	64.843,6
2	Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin
			Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	10.687,49	16.400,53	27.613,89	33.447,08	39.143,44
			Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	60%	65%	70%	75%	77%
			Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%	50%	50%	50%	50%
3	Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan	Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan	Jumlah rumah tangga perikanan (RTP)	27.615	27.947	28.282	28.622	28.965
4	Meningkatkan angka konsumsi ikan	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,60	41,00	41,60	42,00	42,50
5	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	BB Indeks	A Indeks	A Indeks	AA Indeks	AA Indeks

### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi serta permasalahan daerah dalam bidang kelautan dan perikanan maka tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi perikanan.
2. Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan.
4. Meningkatkan angka konsumsi ikan.
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Tujuan–tujuan tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dengan program-program yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi serta Program yang mendukung**

<b>Tujuan 1:</b> Meningkatkan produksi perikanan	
<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya produksi perikanan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> </ol>
<b>Tujuan 2:</b> Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	
<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan</li> </ol>
<b>Tujuan 3:</b> Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan	
<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>
Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> <li>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> </ol>

<b>Tujuan 4:</b> Meningkatkan angka konsumsi ikan	
<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>
Meningkatnya angka konsumsi ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
<b>Tujuan 5:</b> Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	
<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memiliki 5 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan.
2. Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
3. Meningkatnya Pelaku usaha perikanan
4. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik.

Program kerja Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2023 mengacu kepada Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 dengan menggariskan beberapa Program dan Kegiatan dalam rangka Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang sesuai Permendagri No.90 Tahun 2019 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
5. Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Pada tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menyusun Penetapan Kinerja sebagai proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik.

Indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran-sasaran tersebut disepakati sebagaimana diuraikan berikut.

1. Meningkatnya produksi perikanan, dengan 2 indikator sasaran yaitu: 1) jumlah produksi perikanan tangkap (ton), dan; 2) jumlah produksi perikanan budidaya (ton)
2. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan 4 indikator sasaran yaitu: 1) Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K; 2) Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha); 3) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan ; 4) Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.
3. Meningkatnya pelaku usaha perikanan, dengan indikator sasaran Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)
4. Meningkatnya angka konsumsi ikan dengan indikator sasaran Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Seperti yang terlihat pada tabel 2.3 berikut:



Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	54.807,80
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	58.997,00
2	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 izin
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	16.400,53
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	65%
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%
3	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	27.947
4	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	41,00
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A Indeks

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 43.529.895.650,- (empat puluh tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian belanja operasional sebesar Rp 37.488.146.192,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) dan belanja modal sebesar Rp 6.041.749.458,- (enam milyar empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

### 2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang bersumber dari APBD murni yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi**

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Prosen-tase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Rp 12.242.514.482,-	28,1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>• Program Pengelolaan Perikanan budidaya</li> </ul>
2.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Rp 4.869.891.327,-	11,2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>• Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
3.	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Rp 13.793.097.199,-	31,7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>• Program Pengelolaan Perikanan budidaya</li> <li>• Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ul>
4.	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Rp 1.550.582.717,-	3,6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ul>
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 24.866.907.124,-	57,1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi</li> </ul>

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara, membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar Nasional (jika ada), melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, melakukan analisis atas efektifitas penggunaan sumberdaya pendukung kinerja, melakukan analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

### 3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria/ Kode warna
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	54.807,8	54.807,5	100,0%	Sangat Baik
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	58.997,0	50.807,1	86,12%	Tinggi
2.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 Izin	0	0	Sangat Rendah
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	16.400,53	0	0	Sangat Rendah
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	65%	62%	95,38%	Sangat Baik
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%	50%	100%	Sangat Baik
3.	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	27.947	30.669	109,7%	Sangat Baik
4.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	41,00	40,8	99,5%	Sangat Baik
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A Indeks	BB Indeks	96,5%	Sangat Baik

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memiliki 9 (sembilan) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 5 (lima) sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan dari total indikator dengan rata-rata persentase capaian sasaran sebesar 89,5%.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2023, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 89,5%. Secara detail capaian kinerja tersebut dapat dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir dan dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

#### Sasaran #1 Meningkatnya Produksi Perikanan

Sasaran ini dicapai memiliki 2 (dua) indikator sasaran yaitu: (1) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton), dan; (2) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton). Indikator pertama yaitu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) dicapai melalui program pengelolaan perikanan tangkap yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 mil
- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Sedangkan indikator kedua yaitu Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) dicapai melalui program pengelolaan perikanan budidaya yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Produksi Perikanan Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	54.807,8	54.807,5	100,0%
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	58.997,0	50.807,1	86,12%

Untuk indikator pertama yaitu jumlah produksi perikanan tangkap dengan target indikator di tahun 2022 sebesar 54.807,8 ton telah terealisasi sebesar 54.807,5 ton dengan capaian sebesar 100,0%. Dapat dikatakan untuk indikator jumlah produksi perikanan tangkap capaian tahun 2023 sudah hampir memenuhi target. Sedangkan untuk indikator kedua yaitu jumlah produksi perikanan budidaya dengan target indikator sebesar 58.997 ton telah terealisasi sebesar 50.807,1 ton dengan capaian sebesar 86,1%. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian rata-rata untuk sasaran meningkatnya produksi perikanan adalah sebesar 93%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

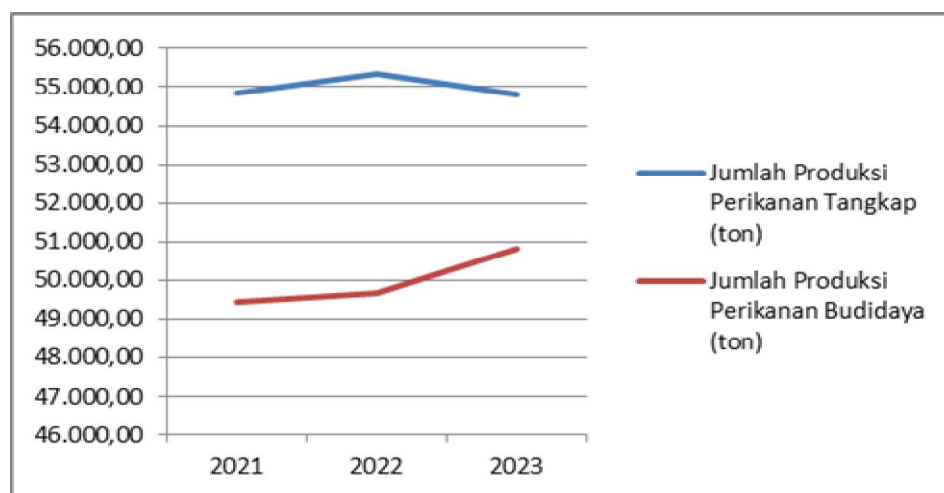
**Tabel 3.4. Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tahun 2022 serta Tahun 2020 dan Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator	Realisasi		Realisasi		
			2020	2021	Target 2023	Realisasi 2023*	% capaian
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	54.857,3	55.347,5	54.807,8	54.807,5	100,0%
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	49.428,9	49.665,9	58.997,0	50.807,1	86,12%

\*Realisasi sementara

Untuk kedua indikator pada sasaran ini pada tahun-tahun sebelumnya belum ditargetkan dan belum dapat membandingkan capaian sehingga yang dibandingkan adalah realisasinya. Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut :

**Gambar 3.1 Perbandingan realisasi produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya**



Dapat dilihat pada gambar 3.1 jumlah produksi perikanan tangkap pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami sedikit penurunan, sedangkan pada jumlah produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir sehingga di tahun 2023 terealisasi melebihi 2 (dua) tahun terakhir.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5 Capaian Kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan s.d Jangka Menengah Daerah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 %	Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	54.857,3	54.807,5	100,0%	55.800,3	98,2%
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	49.428,9	50.807,1	86,12%	64.843,6	78,4%

Pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap jika dilihat capaian pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target tahun 2023 telah tercapai sebesar 98,2%, pada tahun 2026 akan memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada indikator jumlah produksi perikanan budidaya dengan target produksi tahun 2026 sebesar 64.843 ton capaian pada tahun 2023 sebesar 50.807 ton (78,4%).

Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap adalah anggaran APBD/APBN pada program pengelolaan perikanan tangkap. Sumberdaya pendukung kinerja tersebut dapat efektif dengan mengadakan kegiatan bimtek keterampilan nelayan, kegiatan pengawakan kapal perikanan dan perizinan. Kegiatan akan berhasil apabila ditunjang oleh adanya identifikasi kegiatan, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta adanya monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap antara lain sebagai berikut :

- a. Bantuan alat tangkap dan kapal

b. Bimtek keterampilan nelayan

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap antara lain sebagai berikut :

- a. Ombak besar.
- b. Harga BBM mahal.
- c. Alat tangkap yang sudah tidak layak untuk digunakan untuk penangkapan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan bantuan subsidi BBM kepada nelayan.
- b. Memberikan bantuan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan

Pada sasaran meningkatnya produksi perikanan ini untuk indikator jumlah produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi baik tangkapan laut dan maupun perairan umum.

Sedangkan sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan budidaya adalah sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, sumberdaya alam, dan ketersediaan anggaran. Sumberdaya pendukung kinerja tersebut dapat efektif dengan mengadakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, penyediaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan yang efektif, dan penggunaan anggaran yang efisien.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan budidaya antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya bantuan pemerintah
- b. Tingginya permintaan pasar
- c. Mudah akses informasi teknologi perikanan budidaya

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatnya harga pakan



b. Alih fungsi lahan

Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri
- b. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan
- c. Pemberian bantuan benih dan pakan ikan serta sarana dan prasarana pembudidaya ikan

Pada sasaran meningkatnya produksi perikanan ini untuk indikator jumlah produksi perikanan budidaya merupakan jumlah produksi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi baik pembudidayaan jaring apung tawar, jaring tancap tawar, karamba, kolam air deras, kolam air tenang, minapadi dan tambak sederhana.

## **Sasaran #2 Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Sasaran ini dicapai memiliki 4 (empat) indikator sasaran yaitu: (1) Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K; (2) Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha); (3) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan; (4) Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan. Indikator pertama yaitu Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K dan indikator kedua yaitu Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) dicapai melalui program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar Minyak dan Gas Bumi  
Sedangkan indikator ketiga yaitu Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dan indikator keempat yaitu Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dicapai melalui program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :
- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil

- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Capaian Realisasi Kinerja Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Tahun 2022**

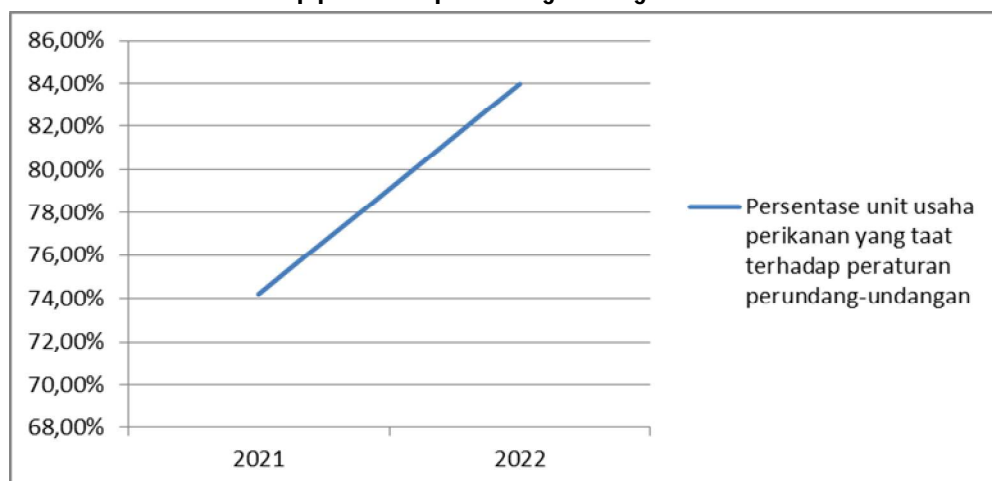
No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 izin	0	0,0%
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	16.400,53	0	0,0%
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	65%	62%	95,4%
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%	50%	100%

Untuk indikator pertama yaitu Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K dengan target indikator di tahun 2023 sebanyak 2 izin terealisasi sebanyak 0 izin dengan capaian sebesar 0,00%. Hal ini dikarenakan lahirnya UU no.11/2020 bahwa RZWP3K diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 28/2021 Pasal 139 (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan di Perairan Pesisir kepada Gubernur sepanjang RZWP3K telah integrasi dengan RTRWP. Target pada indikator sasaran ini akan diajukan perubahan dari 2 izin menjadi 2 rekomendasi pada perubahan Renstra. Indikator kedua yaitu Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) dengan target indikator sebesar 16.400,53 Ha terealisasi sebesar 0 Ha dengan capaian sebesar 0,00%. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran yang secara khusus diperuntukkan merealisasikan kegiatan. Indikator ketiga yaitu Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan target di tahun 2023 sebesar 60% terealisasi sebesar 62% dengan capaian sebesar 95,4%, meningkat terhadap persentase tingkat kepatuhan berdasarkan data pelaku usaha perikanan dari 11 Kabupaten/Kota. Dan indikator keempat yaitu Persentase penanganan kasus

pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dengan target di tahun 2023 sebesar 50% terealisasi sebesar 50% dengan capaian 100%, tetap sama dengan target tahun sebelumnya karena keterbatasan anggaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian rata-rata untuk sasaran Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan adalah sebesar 49%.

Untuk keempat indikator pada sasaran ini pada tahun-tahun sebelumnya belum ditargetkan sehingga tidak dapat membandingkan capaian. Pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dapat dibandingkan realisasi dengan tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut :

**Gambar 3.2 Perbandingan realisasi persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan**



Dapat dilihat pada gambar 3.2 persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.7 Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan s.d Jangka Menengah Daerah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 %	Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026
2.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	-	2 izin	0,00	2 Izin	0,00%
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	-	10.687,49	0,00	39.143,44	0,00%
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	74,21%	65%	62%	95,4%	80,52%
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	-	50%	50%	100%	100%

Pada indikator Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K jika dilihat capaian pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan target tahun 2023 telah tercapai sebesar 0,00% pada tahun 2026 akan tercapai target yang telah ditetapkan apabila target sudah berubah menjadi 2 rekomendasi dan proses integrasi RZWP3K dengan RTRW terlaksana dan ditetapkannya Perda RTRW. Pada indikator Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) jika dibandingkan dengan target 2022, target pada tahun 2026 akan tercapai apabila adanya ketersediaan anggaran. Pada indikator Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan capaian di tahun 2023 jika dibandingkan dengan target tahun 2026 telah tercapai sebesar 109,09%. Meningkatnya pelaku usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan karena sudah terlaksananya pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan. Dan pada indikator Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan capaian di tahun 2022 jika dibandingkan terhadap target di tahun 2026 adalah sebesar 100%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah PPNS, Pengawas perikanan dan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan pada indikator pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K

adalah sumberdaya manusia, yang akan efektif jika adanya peningkatan sumberdaya manusia di bidang GIS. Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) adalah adanya kepastian hukum Kawasan Konservasi Perairan Daratan (KKPD) yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan adalah ketersediaan anggaran APBD/APBN, kapal pengawas, PPNS, pengawas perikanan dan staf pengawasan serta keterlibatan aparat terkait dari dinas Kabupaten/Kota. Kegiatan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi efektif jika didukung oleh pendukung kinerja yang saling bekerjasama. Dan sumberdaya pendukung pada indikator persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan adalah anggaran APBD/APBN, PPNS, pengawas perikanan dan staf pengawasan. Kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi efektif jika didukung oleh sumberdaya pendukung kinerja yang saling bekerja sama.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan pada indikator pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K antara lain integrasi RTRW dengan RZWP3K yang sedang dalam proses. Pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) antara lain perlunya pendanaan yang cukup agar kegiatan dapat terlaksana. Pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan antara lain adanya kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Pada indikator persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan antara lain memperbanyak sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan pada indikator pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K antara lain sebagai berikut :

- a. Lahirnya UU no 11 / 2020 bahwa RZWP3K diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 28/2021 Pasal 139 (1)  
Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan di Perairan Pesisir kepada Gubernur sepanjang RZWP3K telah integrasi dengan RTRWP

Pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) antara lain belum tersedianya anggaran. Pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- a. Sarana prasarana pengawasan yang kurang memadai
- b. Kurangnya anggaran yang tersedia

Pada indikator persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan antara lain adalah tidak adanya PPNS di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan pada sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan selama tahun 2022 antara lain pada indikator pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K adalah proses integrasi RZWP3K dengan RTRW segera terlaksana dengan ditetapkannya Perda RTRW. Pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) antara lain ketersediaan anggaran. Pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan antara lain dengan adanya penambahan personil pengawas, PPNS dan pengadaan sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pada indikator persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan antara lain adalah penambahan jumlah PPNS di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

### **Sasaran #3 Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perikanan**

Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8 Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	27.615	30.669	109,7%

Sasaran meningkatnya pelaku usaha perikanan dengan indikator jumlah pelaku usaha perikanan, di tahun 2023 terealisasi sebanyak 30.303 RTP dari target 27.615 RTP dengan persentase capaian sebesar 109,73%.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9 Capaian Kinerja Meningkatnya Pelaku Usaha s.d Jangka Menengah Daerah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 %	Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026
3.	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)		27.615	109,7	28.965	105,8%

Jika dilihat capaian pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan target tahun 2023 telah tercapai sebesar 104,62%, pada tahun 2026 akan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pelaku usaha adalah anggaran APBD/APBN dan stakeholder terkait. Untuk meningkatkan efektifitas sumberdaya pendukung peningkatan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, perlu adanya kegiatan bimtek keterampilan nelayan, kegiatan pengawakan kapal dan perizinan. Sedangkan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan akan efektif jika sumberdaya pendukung kinerja solid dan salong bekerja sama dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pelaku usaha perikanan antara lain di bidang pengolahan dan pemasaran yaitu adanya kepatuhan kelayakan usaha pengolahan dan pemasaran berdasarkan NIB dan / atau sertifikat SKP / GMP

serta adanya ragam inovasi produk olahan guna peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam peningkatan pelaku usaha perikanan..

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pelaku usaha perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap adalah adanya penurunan hasil tangkapan karena adanya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), bahan bakar yang mahal, dan kebanyakan nelayan menangkap ikan skala kecil sehingga tidak memenuhi pencapaian target penangkapan

Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan bimtek keterampilan nelayan
- b. Memberi bantuan kepada nelayan
- c. Memberikan bantuan subsidi BBM berupa uang kepada nelayan
- d. Terus menggalakkan sosialisasi/kampanye GEMARIKAN ke daerah
- e. Pelatihan/bimtek/demo pengolahan guna peningkatan skill pengolahan dan pemasaran ikan
- f. Peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam konsumsi ikan

#### Sasaran #4 Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan

Sasaran ini dicapai melalui program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya angka konsumsi ikan Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	41,0	40,8	99,51%



Dari target Angka Konsumsi Ikan (AKI) di tahun 2023 sebesar 41,0 kg/kapita/tahun, capaian AKI 2023 yaitu 40,8 kg/kapita/tahun sehingga berdasarkan capaian tersebut sudah melebihi target yakni 99,5%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

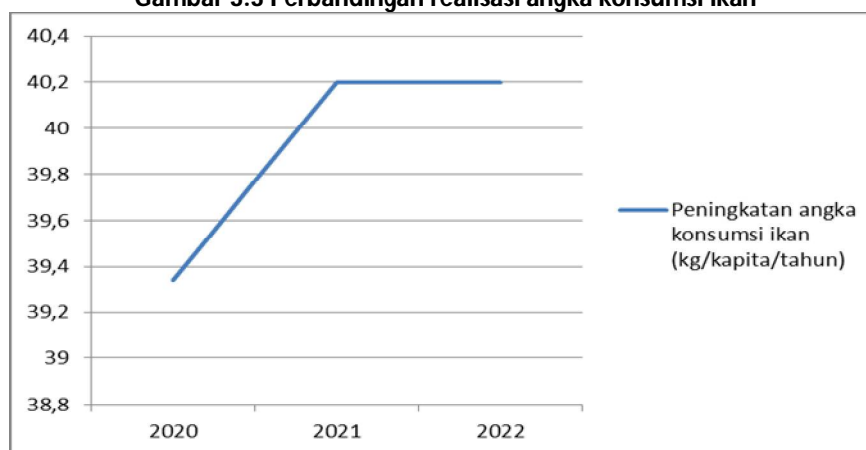
**Tabel 3.11. Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Angka konsumsi ikan Tahun 2023 serta Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Realisasi		Realisasi		
			2021	2022	Target	Realisasi*	% capaian
4	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,2	40,8	41,0	40,8	99,5

\*Realisasi sementara

Untuk indikator pada sasaran ini pada tahun-tahun sebelumnya belum ditargetkan sehingga tidak dapat membandingkan capaian sehingga yang dibandingkan adalah realisasinya. Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut :

**Gambar 3.3 Perbandingan realisasi angka konsumsi ikan**



Dapat dilihat pada gambar 3.1 angka konsumsi ikan pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan di tahun 2020-2021, sehingga dengan optimis di tahun 2022 juga akan terjadi peningkatan meskipun angka konsumsi ikan tahun 2022 belum rilis.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.12 Capaian Kinerja sasaran meningkatnya angka konsumsi ikan s.d Jangka Menengah Daerah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2022 %	Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026
4.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,20	41,0	99,5%	42,50	96%

Dari target Angka Konsumsi Ikan (AKI) tahun 2026 sebesar 42,5 kg/kapita/tahun, dan capaian AKI 2023 yang masih berdasarkan angka capaian 2022 maka diprediksi capaian 2026 akan memenuhi (minimal mendekati) angka target AKI tahun 2026 dengan didukung anggaran yang memadai dan sumberdaya kinerja.

Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah anggaran APBD/APBN, Pembina mutu, analis pasar hasil perikanan, pengawas perikanan, jajaran pelaksana bidang pengawasan dan penguatan daya saing dan produk, dinas Kabupaten/Kota terkait serta instansi terkait lainnya. Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menjadi efektif apabila didukung oleh sumberdaya pendukung kinerja yang solid dan asling bekerja sama dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain sebagai berikut :

- a. Minat masyarakat yang tinggi untuk mengkonsumsi ikan
- b. Ragam inovasi produk olahan guna peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam peningkatan angka konsumsi ikan

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain rendahnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2023 antara lain terus menggalakkan sosialisasi/kampanye GEMARIKAN ke daerah serta pelatihan/bimtek/demo pengolahan guna peningkatan skill pengolahan dan pemasaran ikan serta peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam upaya peningkatan konsumsi ikan.

### Sasaran #5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran ini dicapai melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.13 Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A Indeks	BB Indeks	96,5%

Terlihat pada tabel diatas, untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik telah tercapai 96,5%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja dan realisasi pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

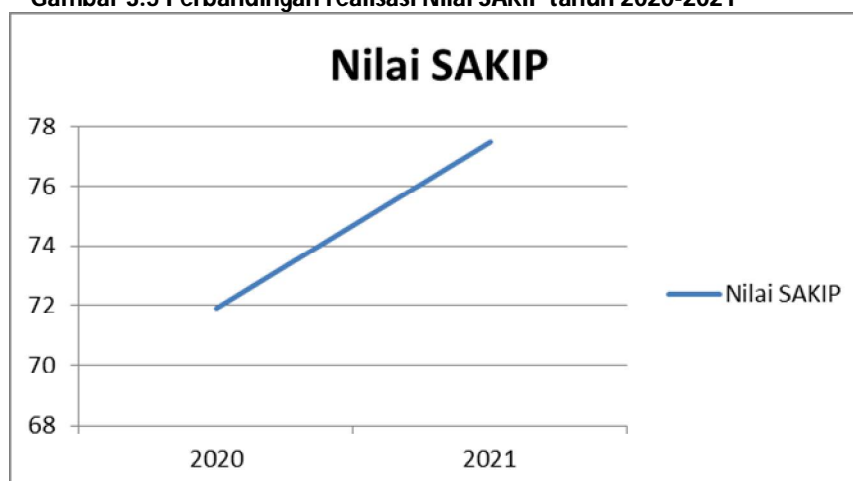
**Tabel 3.14. Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023 serta Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Capaian/ Realisasi		Capaian/ Realisasi		
			2021	2022	Target	Realisasi*	% capaian
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) / Nilai SAKIP	BB Indeks 75,76	BB Indeks 77,2	A Indeks 80	BB Indeks 77,2	96,5

\*Realisasi sementara

Untuk indikator pada sasaran ini lebih jelasnya dapat dilihat perbandingan realisasinya pada gambar 3.1 berikut :

Gambar 3.5 Perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2020-2021



Dapat dilihat pada gambar 3.5 Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15 Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik s.d Jangka Menengah Daerah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 %	Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	BB Indeks	A Indeks	96,5	AA Indeks	-

Berdasarkan tabel 3.15 capaian Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022 jika dibandingkan dengan target di tahun 2026 yaitu AA Indeks maka kemungkinan akan tercapai. Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah sumberdaya manusia dalam menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain adalah konsistensi dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja baik di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Instansi Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jambi.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain kurangnya anggaran untuk melakukan koordinasi. Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2022 antara lain melakukan Rakortekrenbang.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar 96,4% atau sebesar Rp 41.964.726.761,- (empat puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dari anggaran sebesar Rp 43.529.895.650,- (empat puluh tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	54.807,8	54.807,5	100,0%	6804278904	6756444636	99,3
		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	58.997,0	50.807,1	86,12%	5438235578	5423260858	99,7
2	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 Izin	0	0	1178508927	1123506640	95,3
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	16.400,53	0	0			
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	65%	62%	95,38%	3691382400	3547503880	96,1
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%	50%	100%			
3	Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan	Jumlah rumah tangga perikanan (RTP)	27.947	30.669	109,7%			
4	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	41,00	40,8	99,5%	1550582717	1536432431	99,1
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A Indeks	BB Indeks	96,5%	24866907124	23577578316	94,8

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel 3.17 berikut:

**Tabel 3.17 Analisis Efisiensi Anggaran**

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Capaian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	AA x COP	(AA X COP) - RA	Efisiensi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)÷(3)
Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	100,00%	6.804.278.904	6.756.444.636	6.804.278.904	47.834.268	0,70%
	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	86,12%	5.438.235.578	5.423.260.858	4.683.408.480	- 739.852.378	-13,60%
Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K (0%)	0%	1.178.508.927	1.123.506.640	-	- 1.123.506.640	-95,33%
	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) (0%)						
	Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (95,38%)	97,69%	3.691.382.400	3.547.503.880	3.606.111.467	58.607.587	1,59%
	Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (100%)						
Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan	Jumlah rumah tangga perikanan (RTP)	109,70%	13.793.097.199	13.716.137.925	15.131.027.627	1.414.889.702	10,26%
Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	99,50%	1.550.582.717	1.536.432.431	1.542.829.803	6.397.372	0,41%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	96,50%	24.866.907.124	23.577.578.316	23.996.565.375	418.987.059	1,68%
Total			57.322.992.849	55.680.864.686	55.764.221.656	83.356.970	0,15%

### **Analisis Efisiensi**

Berdasarkan tabel 3.17 diatas, terdapat 6 (enam) indikator sasaran strategis yang telah tergolong efisien dengan efisiensi anggaran sebesar 0,15%.



## IV. PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah, dengan indikator :
  - a. Untuk sasaran Meningkatnya produksi perikanan, terdapat 2 (dua) indikator sasaran yaitu: 1) Jumlah produksi perikanan tangkap (ton), dan; 2) Jumlah produksi perikanan budidaya (ton). Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk indikator 1) Jumlah produksi perikanan tangkap pada Tahun 2023 adalah sebesar 100,0% dan untuk indikator 2) Jumlah produksi perikanan budidaya pada Tahun 2023 adalah sebesar 86,12%.
  - b. Sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, terdapat 4 indikator sasaran yaitu: 1) Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2023 adalah sebesar 0,00%; 2) Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2023 adalah sebesar 0,00%; 3) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2023 adalah sebesar 95,4%, dan; 4) Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2023 adalah sebesar 100,0%.
  - c. Sasaran meningkatnya Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan, dengan indikatornya Jumlah rumah tangga perikanan (RTP), capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebesar 109,7%.

- d. Sasaran meningkatnya angka konsumsi ikan, dengan indikatornya Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun), capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebesar 99,5%.
  - e. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikatornya Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebesar 96,5%
2. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti masih terbatasnya kualitas dan jumlah sumberdaya manusia. khususnya yang berpendidikan teknis kelautan dan perikanan yang ada di UPT /Instansi serta di lapangan, sehingga hal ini sangat mempengaruhi pencapaian kinerja dalam bidang pembinaan dan penyuluhan perikanan. Guna mengantisipasi permasalahan yang ada perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Selalu konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, juga dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, serta instansi pemerintah lainnya maupun pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
  - b. Meningkatkan kinerja pengelolaan program dan kegiatan dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategik yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
  - c. Memaksimalkan bantuan kapal > 30 GT dari pemerintah pusat sehingga wilayah tangkapan nelayan dapat menjangkau daerah yang lebih luas, serta memberikan bantuan alat penangkapan ikan bagi nelayan.
  - d. Diperlukan rekrutmen tenaga teknis baru yang berpendidikan teknis perikanan. Selain itu telah diupayakan untuk memberikan kesempatan berlatih dan magang kepada aparat yang ada.
  - e. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan laporan LAKIP yang ke-23 (dua puluh tiga). Namun demikian LKJ ini masih memerlukan penyempurnaan terutama dalam menganalisis kinerja organisasi, Oleh karena itu, masukan-masukan yang konstruktif sangat diperlukan bagi penyempurnaan dan pengembangan dimasa mendatang.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TEMAWISMAN, S.Pi**  
Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi**  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**  
Jabatan : **Gubernur Jambi**  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

**TEMAWISMAN, S.Pi**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19681021 199903 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	54.807,80
		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	58.997,00
2	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 izin
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	16.400,53
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	65%
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%
3	Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan	Jumlah rumah tangga perikanan (RTP)	27.947
4	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	41,00
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A Indeks

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 25.166.556.289,-	APBD + DAK
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 1.088.108.927,-	APBD
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 15.499.115.664,-	APBD + DAK
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 4.981.635.578,-	APBD
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 3.601.182.400,-	APBD + DAK
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 1.613.318.265,-	APBD


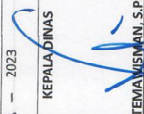
Gubernur Jambi,

**Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Jambi,










**TEMAWISMAN, S.Pi**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681021 199903 1 002

## Lampiran 2 SOP Pengumpulan Data Kinerja

 <p style="text-align: center;"><b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIAT</b></p>		Nomor SOP	SOP-10K/1.2/2023
		Tanggal Pembuatan	2021
		Tanggal Revisi	13-03-2023
		Tanggal Efektif	27-03-2023
		Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;"><b>KEPALA DINAS</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>TEMA VISION S.P.I</b> Perbina Utama Madhya NIP.19681021.199003.1.002</p>
		Nama SOP	Prosedur Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan R.B No.35 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>2. Peraturan R.B No.19 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah</li> <li>3. Permenagri No.90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</li> <li>9. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi</li> </ol> <p><b>Keterkaitan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Surat Masuk</li> <li>2. SOP Surat Keluar</li> <li>3. SOP Penerbitan SPM - UP/GU/TU</li> <li>4. SOP Penerbitan SPP - UP/GU/TU</li> <li>5. SOP Pengarsipan</li> </ol> <p><b>Peringatan:</b></p> <p>Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, Maka tidak dapat terlaksana dengan maksimal</p>		Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1</li> <li>2. Memahami Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja</li> </ol>
		<p><b>Perengkapan Kinerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Komputer</li> <li>2. Alat Dokumentasi</li> </ol>	
		<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil akan disimpan sebagai Data</li> </ol>	



### PROSEDUR MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Kasubag Program, Kepegawaian dan Pelaporan	Pejabat Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Staff Membuat Draft Format Data Kinerja yang akan dikoreksi oleh Kasubag Program, Kepegawaian dan Pelaporan							
2	Kasubag Program, Kepegawaian dan Pelaporan Mengoreksi Format Data Kinerja. Bila Benar digunakan bila Salah maka akan dikembalikan ke Staff untuk di Perbaiki							
3	Staff Mengandakan Draft Format Data Kinerja dan Menyerahkan Draft data ke Pejabat Terkait							
4	Pejabat Terkait menerima dan mengisi Format Data Kinerja dan akan dikembalikan ke Kasubag Program, Kepegawaian dan Pelaporan untuk di Verifikasi							
5	Kasubag Program, Kepegawaian dan Pelaporan menerima Format Data dan melakukan Verifikasi dan dikembalikan ke Staff untuk di Entry							
6	Staff Melakukan Entry Data Kinerja dan diserahkan kepada Kasubag Program, Kepegawaian dan Pelaporan							
7	Kasubag Program, Kepegawaian dan Pelaporan melakukan Validasi dan paraf Data Kinerja							
8	Kasubag Program, Kepegawaian dan Pelaporan Melakukan Penandatanganan Data Kinerja							



## Lampiran 3 Sumber Data (Primer)

## Hasil Validasi Data Statistik Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023

<b>Perikanan Budidaya</b>	
Pembesaran	50.807 ton
Pembenihan	156.754 000 ekor
Ikan Hias	3.431.075 ekor

<b>Perikanan Tangkap</b>	
Perairan Laut	54.807,5 ton
Perairan Darat	46.742 ton
	8.065 ton

<b>Produksi Olahan UPI Mikro</b>	<b>4.057.422 kg</b>
----------------------------------	---------------------

<b>Pelaku Usaha (KUSUKA)</b>	
Nelayan (Laut,PUD)	30.669 pelaku usaha
Pembudidaya	9.804 pelaku usaha
Pengolah Ikan	19.457 pelaku usaha
Pemasar	968 pelaku usaha
	440 pelaku usaha

Mengetahui,  
Jambi, Januari 2023

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI JAMBI**

  
**ASRAF, S.Pt, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661120 199403 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura  
J A M B I

e-mail : dkp.jambi@yahoo.co.id

Jambi, 7 Juni 2023

Nomor : s. 247/DKP-4.3/VI/2023  
Lampiran :  
Perihal : Penyampaian Hasil Penghitungan  
Angka Konsumsi Ikan Tahun 2022

Kepada Yth,  
Direktur Pemasaran Direktorat  
Jenderal Penguatan Daya Saing  
Produk Kelautan dan Perikanan  
Di \_  
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. B.1761/DJPDSPKP.4/TU.210/IV/2023 saat perihal Penyampaian Hasil Penghitungan Angka Konsumsi Ikan Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, setelah dilakukan pengumpulan dan penghitungan maka bersama ini kami sampaikan data terkait sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Temarisman, S. Pi**

J. Pembina Utama Madya

NIP. 19681021 199903 1 002

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Gubernur Jambi
2. Arsip

Lampiran 1 : Data Perhitungan AKI Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi :  
 Nomor : 278 /DKP-4.3/VI/2023  
 Tanggal : 7 Juni 2023

No	Kabupaten / Kota	AKI A	AKI B	AKI C	AKI TOTAL
1	Provinsi Jambi	32,20	5,93	2,67	40,80
2	Kerinci	31,36	7,10	0,26	38,72
3	Merangin	24,93	7,16	1,60	33,70
4	Sarolangun	28,25	3,09	1,57	32,91
5	Batanghari	29,62	8,68	1,91	40,19
6	Muarojambi	35,58	7,12	2,13	44,83
7	Tanjung Jabung Timur	47,18	1,74	2,45	51,37
8	Tanjung Jabung Barat	32,84	1,97	1,28	36,10
9	Tebo	27,32	2,58	1,49	31,39
10	Bungo	30,39	6,85	1,86	39,10
11	Kota Jambi	37,1	6,67	1,53	45,65
12	Sungai Penuh	29,25	5,79	1,75	36,79
<b>AKI A Provinsi</b>					

KEPALA DINAS,  
  
**Temenggiman, S. Pi**  
 Kepala Dinas Utama Madya  
 NIP. 19681621 199903 1 002

LAPORAN  
REALISASI CAPAIAN KINERJA, KEUANGAN DAN KEBUJUKAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023

Triwulan Ke		Nama Perangkat Daerah		: IV (Empat) : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi										Solusi/Kabijakan	
NO	2	3	4	5	6	Target Anggaran Triwulan IV		Realisasi Keuangan Triwulan IV		Target Kinerja Pertama Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan IV		Masalah/Kendala	14
1	2	3	4	5	6	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)		%		Jumlah A (80,00)		Indeks BB (77,20)		13	14
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	24.866.907.124	24.866.907.124			23.577.578.316		94,82				Untuk nilai tahun 2023 belum ditulis/dikeluarkan oleh OPD terkait	Akan terus berkoordinasi dengan OPD terkait dan nilai yang digunakan saat ini masih menggunakan nilai tahun 2022
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan kinerja dinas kelautan dan perikanan	781.588.000	781.588.000	781.588.000		97,01		2		Laporan		2	100
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	191.502.000		186.827.859		97,56		2		Dokumen		2	100
		2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	166.214.000		156.203.638		93,98		10		Laporan		10	100
		3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	423.872.000		415.167.270		97,95		1		Laporan		1	100
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelaola administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	20.094.305.892	20.094.305.892	19.187.172.766		95,49		12		Bulan		12	100
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19.722.315.992		18.914.984.366		95,91		154		Bulan/Bulan		154	100
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	371.989.900		272.188.400		73,17		1		Dokumen		1	100
3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan	148.821.922	148.821.922	148.158.731		99,55		100		%		100	100
		1. Sub Kegiatan Pentatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pentatausahaan barang milik daerah pada SKPD	148.821.922		148.158.731		99,55		2		Laporan		2	100
4		Kegiatan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Terlaksananya Disiplin ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	293.638.356	293.638.356	291.909.327		99,41		1		Tahun		1,00	100
		1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	150.381.000		150.350.000		99,98		325		Paket		325	100

NO	Kode	Usan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran Trivulan IV	Realisasi Keuangan			Target Kinerja Per tahun			Realisasi Capaian Kinerja		Masalah/Kendala	Solusi/Kebijakan
						Trivulan IV	%	Jumlah	Satuan	Trivulan IV	%	Trivulan IV	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	21.950.000		21.958.571	99,35	20	Orang	20	100				
		3. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	121.307.356		119.970.756	98,90	200	Orang	200	100				
		<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Peringkat Daerah</b>	<b>823.331.826</b>	<b>823.331.826</b>	<b>821.442.707</b>	<b>99,70</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>				
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10.000.000		9.420.000	94,20	3	Paket	3	100				
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	97.863.826		97.358.411	99,48	5	Paket	5	100				
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	20.000.000		18.597.000	92,99	2	Paket	2	100				
		4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	40.000.000		40.000.000	100,00	2	Paket	2	100				
		5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4.998.000		4.998.000	100,00	1	Dokumen	1	100				
		6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	651.070.000		651.069.296	100,00	12	Laporan	12,00	100				
		<b>6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.476.789.538</b>	<b>1.476.789.538</b>	<b>1.275.299.060</b>	<b>86,36</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>100</b>				
		1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	702.970.000		562.000.000	79,95	1	Unit	1	100				
		2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-		-	-	-	Unit	-	0	Dilakukan refocusing anggaran			
		3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	30.307.072		30.306.000	100,00	2	Paket	2	100				
		4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	121.229.886		121.221.000	99,99	10	Unit	10	100				

NO	Kode	Usan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran Triwulan IV	Realisasi Keuangan			Target Kinerja Pertahun			Realisasi Capaian Kinerja		Masalah/Kendala	Solusi/Kebijakan
						Triwulan IV	%	Jumlah	Satuan	Triwulan IV	%	Triwulan IV	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		5. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	600.000.000		539.521.000	89,92	1	Unit	1	100				
		6. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	22.282.580		22.251.060	99,86	10	Unit	10	100				
7		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terkelolanya administrasi umum pada dinas kelautan dan perikanan</b>	<b>637.490.780</b>	<b>637.490.780</b>	<b>535.831.732</b>	<b>84,05</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>				
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000		4.400.000	88,00	1	Laporan	1	100				
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	632.490.780		531.431.732	84,02	4	Laporan	4	100				
8		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terkelolanya administrasi umum pada dinas kelautan dan perikanan</b>	<b>610.340.810</b>	<b>610.340.810</b>	<b>559.565.226</b>	<b>91,68</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>100</b>				
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	514.490.370		488.983.316	95,04	59	Unit	59	100				
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	72.511.200		63.741.910	87,91	4	Unit	4	100				
		3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	23.339.240		6.830.000	29,26	20	Unit	20	100				

NO	Kode	Usuran/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran Triwulan IV	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Pertahun		Realisasi Capaian Kinerja		Masalah/Kendala	Solusi/Kebijakan
						Triwulan IV	%	Jumlah	Satuan	Triwulan IV	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah izin pengelolaan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang diterbitkan	1.178.508.927	1.178.508.927	1.123.506.640	95,33	2	Izin	-	0,00	Dengan adanya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja & PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, bahwa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) harus mendapat persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan dan sampai saat ini seluruh persetujuan KKPRL merupakan kewenangan	Menunggu pendeleasian kewenangan/Permen KP
	1	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kawasan Konservasi yang dikelola secara Berkelanjutan	1.178.508.927	1.178.508.927	1.123.506.640	95,33	16.400,53	Hektar	-	0,00	Dengan adanya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja & PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, bahwa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) harus mendapat persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan dan sampai saat ini seluruh persetujuan KKPRL merupakan kewenangan Pemerintah Pusat	Segera menyusun rencana kerja 2024 untuk pencapaian target
		1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen materi teknis mutakhir perairan pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen final RZWP3K	238.053.000		228.626.650	96,04	1	Dokumen	1	100,00	Telaah menjadi Perda No. 7 Tahun 2023	Menunggu pendeleasian kewenangan/Permen KP
		2. Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Pendapat dan Pemerintah Pusat	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	940.455.927		894.879.990	95,15	3.560,45	Ha	-	0,00	Tidak teralokasinya anggaran untuk penelaah kawasan konservasi yang di SK kan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI	Telaah terbitnya SK Gubernur Jambi Nomor 1345/KEP-GUB/DKP-2/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Perencanaan dan Inventarisasi Penataan dan Inventarisasi Penataan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur



NO	Kode	Unsur/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran Triwulan IV	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Per tahun		Realisasi Capaian Kinerja		Masalah/Kendala	Solusi/Kebijakan
						Triwulan IV	%	Jumlah	Satuan	Triwulan IV	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>	6.804.278.904	6.804.278.904	6.756.444.636	99,30	54.807,8	Ton	73.447	134,0		
	1	<i>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	Meningkatnya produksi perikanan tangkap di laut	3.529.221.620	3.579.863.284	3.513.702.983	99,56	48.905,1	Ton	65.190	133,3		
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil	3.529.221.620		3.513.702.983	99,56	2.000	Unit	3.973	198,7		
	2	<i>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Dalam, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusutakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di PUD	1.239.384.484	1.188.742.820	1.233.928.596	99,56	5.902,7	Ton	7.890	133,7		
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap di PUD	1.239.384.484		1.233.928.596	99,56	300	Unit	1.809	603,00		
	6	<i>Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	Jumlah kapal yang bertambah di pelabuhan perikanan	2.035.672.800	2.035.672.800	2.008.813.057	98,68	4.020	Kapal	4.080	101,49		
IV		1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	1.651.640.000		1.630.985.771	98,75	2	Unit	2	100,00		
		2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Penguasaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi pemerintahan dan penguasaan pelabuhan perikanan yang terlaksana	384.032.800		377.827.286	98,38	2	Layanan	2	100,00		
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Produk Perikanan Budidaya</b>	5.438.235.578	5.438.235.578	5.423.260.858	99,72	58.997	Ton	50.807,1	86,12		
	5	<i>Kegiatan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	5.438.235.578	5.438.235.578	5.423.260.858	99,72	9	Jenis	9	100,00		
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Ditakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau marraat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien	4.997.378.205		4.983.352.347	99,73	100	Unit	100	100,00		



NO	Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran Triwulan IV	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Per tahun		Realisasi Capaian Kinerja		Masalah/Kendala	Solusi/Kebijakan
						Triwulan IV	%	Jumlah	Satuan	Triwulan IV	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V		2. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Kabupaten/kota	Tersedianya sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	262.268.600		260.727.000	99,41	6	Unit	6	100,00		
		4. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas daerah	Jumlah hasil ikan dan lingkungan yang teruji sehat	178.588.773		178.581.511	100,00	2	Dokumen	2	100,00		
		<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan</b>	<b>3.691.382.400</b>	<b>3.691.382.400</b>	<b>3.547.503.880</b>	<b>96,10</b>	<b>65</b>	<b>%</b>	<b>62,00</b>	<b>95,38</b>		
			<b>Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan</b>					<b>50</b>	<b>%</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>		
	1	<b>Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi</b>	<b>3.691.382.400</b>	<b>3.691.382.400</b>	<b>3.547.503.880</b>	<b>96,10</b>	<b>64</b>	<b>%</b>	<b>61,50</b>	<b>96,09</b>		
VI		1. Sub Kegiatan Pengawasan Pemantauan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen hasil pengawasan pemantauan ruang laut sampai dengan 12 mil	2.877.100.000		2.740.176.480	95,24	3	Dokumen	3	100,00		
		2. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	464.282.400		457.351.400	98,51	2	Dokumen	2	100,00		
		3. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang terdaftar dan aktif	350.000.000		349.976.000	99,99	10	Kelompok	10	100,00		
		<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Angka konsumsi ikan</b>	<b>1.550.582.717</b>	<b>1.550.582.717</b>	<b>1.536.432.431</b>	<b>99,09</b>	<b>41,00</b>	<b>Kg/Kapita/ Tahun</b>	<b>40,80</b>	<b>99,51</b>		
	1	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan</b>	<b>428.252.000</b>	<b>428.252.000</b>	<b>417.240.999</b>	<b>97,43</b>	<b>4</b>	<b>Izin</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>		
		1. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam (satu) daerah provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	428.252.000		417.240.999	97,43	3	Dokumen	3	100,00		

NO	Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran Triwulan IV	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Per tahun		Realisasi Capaian Kinerja		Masalah/Kendala	Solusi/Kebijakan
						Triwulan IV	%	Jumlah	Satuan	Triwulan IV	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	339.106.169	339.106.169	337.091.318	99,41	5	Kelompok	5	100,00		
		1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Peningkatan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan yang penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	93.481.340		93.453.959	99,97	13	Unit Usaha	13	100,00		
		2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Meningkatkan Produk dan Jasa Perikanan untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah unit usaha yang diberikan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, dan daya saing serta pemberdayaan masyarakat perikanan melalui produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	245.624.829		243.637.359	99,19	13	Unit Usaha	13	100,00		

19 urusan daerah dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran Triwulan IV	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Pertahun		Realisasi Capaian Kinerja		Masalah/Kendala	Solusi/Kebijakan
				Triwulan IV	%	Jumlah	Satuan	Triwulan IV	%		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19 urusan daerah dan kegiatan	Tersedianya informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	783.224.548	783.224.548	782.100.114	99,86	1	Dokumen	1	100,00		
19 urusan daerah dan kegiatan	Jumlah unit usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diberikan insentif dan fasilitas provinsi	783.224.548	783.224.548	782.100.114	99,86	10	Unit Usaha	15	150,00		

Jambi, 15 Januari 2024  
 PIR. KEPALA DINAS  
 KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 PROVINSI JAMBI  
 HEANOWO, A.P.I  
 Pembina TK I  
 NIP. 19680629 199103 1 004

# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI



**JL. MT HARYONO NO.09 TELANAIPURA-JAMBI**